

AN EDUCATED COMMUNITY: THE KEY TO PARTICIPATORY ELECTION MONITORING

KOLOKIUUM

Jurnal Pendidikan Luar Sekolah
<http://kolokium.ppj.unp.ac.id/>
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang
Sumatera Barat, Indonesia

Volume 11, Nomor 1, Tahun 2023
DOI: 10.24036/kolokium.v11i1.580

Received 04 Januari 2023
Approved 19 April 2023
Published 30 April 2023

Alim Harun Pamungkas^{1,4}, Zulkarnain², Abd. Latif Bustam³

¹ Universitas Negeri Padang

^{1,2,3} Universitas Negeri Malang

⁴ alimharun@fip.unp.ac.id

ABSTRACT

This paper was compiled based on literary sources which explain participatory election supervision as a form of active involvement of the community and all components of government and communities outside the Election Supervisory Body in supporting the implementation of election supervision. A participatory society is understood to be born from a society that has awareness. Awareness is driven from a set of knowledge and skills and morals that a person has. The Need for Achievement (n-Ach) approach and social change are used as an analytical tool for literature review. This paper concludes that the active involvement of the community demands a change in the attitude of the bureaucracy and its accompanying institutions. The views of the organizers of election supervision must be based on the idea that society can improve the ongoing process of implementing election supervision provided that they are given the trust and opportunity.

Keywords: elections, participatory supervision, community, educated, awareness

INTRODUCTION

Demokrasi adalah sistem politik yang memberi ruang bagi keadilan dan persamaan hak bagi semua warga negara (Agustina & Sutarih, 2019). Demokrasi menjadi suatu sistem politik yang dipilih oleh banyak sekali negara di dunia. Karakter utama dari sebuah negara demokrasi adalah didadakannya Pemilihan Umum (Pemilu) (Solihah et al., 2018). Sekalipun Pemilu bukanlah satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun demikian, Pemilu adalah bagian penting dari demokrasi. Hal ini karena Pemilu berfungsi sebagai mekanisme perubahan politik tentang pola dan arah kebijakan publik (Undang-Undang) dan/atau mengenai suksesi legislatif di parlemen dan eksekutif secara periodik (Januwarso et al., 2021).

Pemilu dilaksanakan sebagai wujud demokrasi. Pemilu di Indonesia yang dimulai dari tahun 1955 sudah mengalami perkembangan yang signifikan apabila dilihat dari aspek pengawasan. Istilah Pengawas Pemilu belum dikenal pada saat Pemilu pada tahun 1955.

Pemilu yang diselenggarakan untuk membentuk Dewan Konstituante ini, diselenggarakan atas dasar kepercayaan antara seluruh peserta pemilu dengan warga negara

terhadap penyelenggaraan pemilu (Affairs, 2004; Prasetio et al., 2020; Wartoyo & Tungga, 2019).

Pengawasan pemilu dibentuk pertama kali di Indonesia pada Pemilu tahun 1982. Pada saat itu bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Panitia ini dibentuk atas dasar ketidakpercayaan kelompok masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu oleh Rezim Orde Baru. Selanjutnya, pada Pemilu tahun 1987, terdapat banyak sekali protes atau tuntutan terhadap pelanggaran dan kecurangan pemilihan (Dominasi Golkar dan ABRI). Lahirnya pengawas Pemilu adalah untuk memperbaiki undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu selanjutnya.

Pada perkembangannya lahirlah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, hingga Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat Kecamatan. Namun pada kenyataannya, Bawaslu yang bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, masih mengalami banyak kendala pengawasan (Sulistyo, 2002). Selain karena keterbatasan berdasar pada aturan perundangan, keterbatasan jumlah personil dan fasilitas juga merupakan kendala yang masih dihadapi. Oleh karena itu, dalam hal pengawasan Pemilu, perlu untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat secara independen dalam proses pengawasan Pemilu. Hal ini diharapkan mampu menghasilkan Pemilu yang berintegritas dan partisipatif (Affairs, 2004; Fuad, 2014; Prasetio et al., 2020).

Pengawasan Pemilu yang partisipatif dipahami sebagai terdapatnya keterlibatan aktif masyarakat dan seluruh komponen pemerintah dan komunitas di luar Bawaslu dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan Pemilu (Mujani et al., 2011; Wartoyo & Tungga, 2019). Masyarakat yang partisipatif dipahami lahir dari suatu masyarakat yang memiliki kesadaran. Kesadaran didorong dari seperangkat pengetahuan dan keterampilan serta moral yang dimiliki seseorang (Kadir & Pamungkas, 2020), baik itu diperoleh dari proses belajar yang difasilitasi oleh pendidikan secara formal (di sekolah), informal, (di keluarga) ataupun nonformal (di luar sekolah).

Pendidikan luar sekolah (nonformal) tentu merupakan sesuatu yang penting dalam berkontribusi membangun kesadaran warga masyarakat. Pendidikan luar sekolah sendiri dipahami sebagai semua bentuk pembelajaran di luar sistem persekolahan yang diorganisasi, disengaja, direncanakan untuk membantu masyarakat memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk memperbaiki kehidupannya. Layanan pendidikan luar sekolah dapat dipahami melalui tipologi program berikut: pengembangan masyarakat (*developmental*), program kelembagaan (*institutional*), program penerangan atau informasional (*informational*).

Tipe program pembelajaran informasional tepat untuk membantu berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap pengawasan pemilu yang partisipatif. Program pendidikan luar sekolah dalam tipe ini memfasilitasi terjadinya pertukaran informasi antar kelompok masyarakat tentang isu-isu mutakhir dalam pembahasan Pemilu dan pengawasan partisipatif yang mengacu pada hasil kajian dan atau regulasi pemerintah. Pertukaran informasi dapat dilakukan melalui suatu kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi melalui media masa. Sedangkan program bertipe kelembagaan (*institutional*) diperuntukkan bagi para fasilitator atau petugas yang terlibat langsung dalam aktivitas pendampingan kepemiluan

dan kepengawasannya, berupa pelatihan keterampilan yang dapat segera digunakan untuk membantu para petugas pengawas Pemilu.

Secara informasional, penumbuhan kesadaran masyarakat berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan. Berbagai gerakan telah muncul sebagai hasil pertukaran informasi. Pertukaran informasi yang berlangsung di antara masyarakat telah mengembangkan suatu gerakan yang menghasilkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses Pemilu yang berjalan sesuai asas lingsung, adil, jujur, bebas, dan rahasia, walaupun memang masih ditemui paradox dari peraturan lain yang diskriminatif. Kemunculan berbagai lembaga-lembaga masyarakat yang memperjuangkan terwujudnya akses partisipasi masyarakat menandai lahirnya era kesadaran masyarakat tentang fenomena kepengawasan pemilu yang partisipatif

METHOD

Pendekatan berdasar pada kajian *Need for Achievement* (n-Ach) dan perubahan sosial digunakan sebagai alat analisis dalam tulisan ini. Tulisan ini merupakan tulisan gagasan berbasis pada tahapan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan yaitu studi yang objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan, baik berupa buku, artikel pada jurnal ilmiah dan jurnal populer dalam media massa. Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan situasi yang diteliti. Sumber-sumber kepustakaan ini kemudian menjelaskan urgensi posisi partisipasi masyarakat dalam kepengawasan pemilu yang partisipatif.

DISCUSSION

Pendekatan Teori

Kajian tentang Masyarakat

Masyarakat manusia sering kali dikategorisasi berdasar pada sarana penghidupan utamanya. Kategori masyarakat dalam suatu peradaban umumnya terdiri dari: (1) pemburu dan peramu; (2) masyarakat hortikultura (petani sederhana) (Kawano, 2015); (3) masyarakat agrikultura (petani rekayasa). Pada perkembangannya, muncul kategori: (1) masyarakat industri; dan (2) masyarakat pascaindustri (Baeyer, 2010).

Masyarakat berfungsi untuk membantu individu. Maksudnya, manusia sebagai individu tidaklah dapat untuk menghidupi dirinya sendiri. Hal ini terjadi dalam peristiwa seperti kelahiran, kematian, atau bencana. Masyarakat akan selalu berperan untuk memberikan bantuan dalam beragam bentuk, baik secara fisik, mental, emosional, keuangan, medis, atau spiritual. Peran masyarakat tersebut umumnya dimobilisasi oleh individu atau kelompok masyarakat berpengaruh (Hayati, 2020).

Masyarakat juga akan berperan dalam memberikan pernyataan apresiatif kepada individu atau kelompok masyarakat yang bermurah hati. Sebaliknya, masyarakat juga akan memberikan sangsi normatif kepada individu atau kelompok yang tidak bermurah hati. Apresiasi dan sangsi dalam masyarakat dijalankan oleh institusi masyarakat. Misalnya,

organisasi pemberi nobel bagi mereka yang bermurah hati dan lembaga pemasyarakatan bagi para pelanggar norma masyarakat.

Masyarakat berkembang melalui tahap-tahap perkembangan yang terus meningkat. Perkembangan ini membawa masyarakat pada situasi keteraturan yang pada akhirnya akan menentukan jalannya sejarah manusia. Perkembangan masyarakat (sosial) adalah proses yang tidak dapat dihindari atau bahkan ditentukan (Anderson, 1993; Sudiono, 2020). Masyarakat dimulai dari masa primitif (Springborg, 2018) dan pada akhirnya berkembang menuju masyarakat industri. Kedua pandangan tersebut merupakan penyempurnaan pandangan tentang perubahan masyarakat yang berjalan seiring dengan waktu (Hartle, 2013; Poštić, 2004). Pandangan lainnya adalah bahwa rangkaian perkembangan masyarakat melewati empat tahapan: (1) berburu dan meramu; (2) penggembalaan dan hidup berpindah; (3) pertanian; dan (4) tahap perdagangan (Comim, 2002; West, 1978).

Perkembangan masyarakat terdiri dari beberapa proses. *Pertama*, adalah kolonialisme. Munculnya teori evolusi sosiokultural memungkinkan bagi para ilmuwan Eropa untuk Menyusun suatu pengetahuan baru yang membenarkan praktik-praktik dominasi politik dan ekonomi. Pembeneran bahwa masyarakat pada negeri jajahan kurang berkembang dan tidak mengalami evolusi (sejak masa manusia purba), sedangkan masyarakat Eropa mengalami evolusi secara baik. Pandangan ini bahkan menyebut masyarakat pada bangsa-bangsa jajahan sebagai masyarakat yang biadab dan tidak mengalami pencerahan (Sætra, 2014). Pencerahan pengetahuan secara bertahap akan menghasilkan kemajuan peradaban manusia (Peters, 2019).

Kedua, adalah revolusi industri (Mulyanto, 2008). Hal ini adalah penanda dari kebangkitan kapitalisme. Kebangkitan era yang memungkinkan dan mendorong revolusi terus-menerus dalam alat-alat produksi. Munculnya teori evolusi sosiokultural merupakan cerminan keyakinan bahwa perubahan yang disebabkan oleh revolusi industri dan kapitalisme. Industrialisasi, yang dikombinasikan dengan perubahan politik secara intens yang dibawa oleh revolusi prancis dan konstitusi Amerika Serikat, pada akhirnya membuka jalan baru bagi dominasi demokrasi dalam peradaban manusia (Wuttke et al., 2022).

Kajian tentang Motivasi Berprestasi

Menurut Thomas J. La Belle dalam buku berjudul *Nonformal Education and Social Change in Latin America* terbitan UCLA Latin America Center Publications, Los Angeles pada tahun 1976. Teori Need for Achievement (n-Ach) adalah satu dari teori modernisasi yang dikelompokkan ke dalam pendekatan psikodinamika. Pandangan ini menyebut bahwa, keadaan internal psikologis manusia sangat menentukan kegiatan manusiawi dan perubahannya. Transformasi masyarakat berkembang menjadi masyarakat maju adalah akibat dari perubahan yang terjadi di dalam pikiran para pemimpin masyarakat dan masyarakatnya. Argumentasi utama dari pendekatan psikodinamika adalah: (1) terjadinya perubahan sosial budaya disebabkan oleh tindakan manusia; dan (2) tindakan manusia ditentukan oleh situasi internal manusia itu sendiri.

Situasi internal manusia umumnya disebut juga kepribadian. Kepribadian adalah hasil dari berbagai unsur bawaan, termasuk diantaranya hasrat, naluri, kebutuhan, hasrat dengan faktor sosial yang diinternalisasi seperti norma (*norms*) dan nilai (*value*). Situasi internal ini terbentuk sejak masa anak-anak, bahkan menjadi bagian dari alam bawah sadarnya.

Sedangkan tingkah laku seseorang dipahami sebagai konsekuensi dari hasil kecenderungan situasi internal untuk memperoleh kembali posisi keseimbangan setelah mendapatkan beragam rangsangan yang mengena. Model ini selanjutnya diperkaya dengan anggapan dasar bahwa norma dan nilai yang diinternalisasi mungkin saja saling bertentangan dengan dorongan hasrat atau naluri, sehingga menyebabkan munculnya sublimasi, agresi, represi, dan frustrasi.

Berdasar pada pemikiran psikodinamika ini, tampak bahwa perubahan sosial budaya menuntut adanya suatu perubahan di dalam situasi internal manusia. Selain itu, karena sifat-sifat kepribadian terbentuk pada awal masa kehidupan, dan sangat sulit untuk diubah, maka dalam perubahan sosial budaya tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu singkat. Dengan demikian, suatu upaya perubahan sosial budaya haruslah pula merupakan suatu upaya jangka panjang yang berkelanjutan. Catatannya, kita tidak perlu berharap segera memperoleh hasil dari upaya perubahan sosial tersebut.

Kajian tentang Dinamika dan Perubahan Sosial

Lerner (1958) menjelaskan bahwa unsur pertama di dalam dinamika sosial pembangunan adalah kepribadian *mobile personality* (MB). Seseorang dengan MB adalah pribadi yang berkemampuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek baru dari lingkungannya dan menumbuhkan tuntutan-tuntutan baru menurut pengalamannya. Seseorang dengan MB, umumnya berempati tinggi. Kepribadian dinamik adalah hasil dari sosialisasi yang dialami sejak kecil (masa anak-anak). Akan tetapi, dinyatakan pula bahwa komunikasi melalui media massa/sosial dapat mempercepat proses peningkatan kemampuan empati dan modernitas.

Singkatnya, suatu proses perubahan selalu dimulai dari keberadaan sekelompok inti masyarakat yang dinamik, selanjutnya dibarengi dengan tumbuhnya sistem media massa yang menyebarkan gagasan dan sikap perubahan sosial, yang dilanjutkan dengan interaksi budaya literasi (baca-tulis), industrialisasi, urbanisasi dan keikutsertaan dalam media yang mengarah pada masyarakat modern.

Perubahan sosial hanya terjadi karena adanya perubahan di dalam kepribadian. Penjelasan tersebut dipahami dari pola hubungan antara struktur kepribadian dengan struktur sosial. Masyarakat tradisional tidak dapat berkembang dengan cepat karena sifat statik dan potensi lahirnya kepribadian otoriter yang cenderung tidak inovatif. Daya cipta atau kreativitas merupakan unsur terpenting di dalam transformasi masyarakat untuk menuju modernitas (Hagen, 1962).

Keterlibatan Masyarakat dalam Kepengawasan Pemilu

Terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman kepengawasan pemilu di Indonesia. Meskipun dalam penyelenggaraan kepengawasan Pemilu, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) turut menyertakan komunitas dan unsur masyarakat secara terbuka dalam rangka memotivasi masyarakat yang berpartisipasi agar memiliki n-Ach yang tinggi dan semangat kesukarelaan (Solihah et al., 2018).

Motif berprestasi itu sendiri adalah suatu hasrat seseorang untuk berbuat sebaik-baiknya, bukan demi memperoleh penghargaan sosial atau prestise, tetapi untuk mencapai kepuasan batin. Seseorang dengan n-Ach yang tinggi, cenderung untuk belajar lebih cepat,

bekerja lebih keras, dan melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin terutama apabila pekerjaan tersebut menantang prestasi, serta tidak melakukan semua pekerjaan atau tugas tersebut jika "diimingi" oleh uang, kedudukan dan/atau penghargaan.

Pada kenyataannya, upaya partisipatif cenderung terkendala oleh komunitas atau masyarakat yang masih berwawasan instruktif. Sayangnya, tingkat literasi politik dan kepemiluan masyarakat masih menjadi hambatan upaya ke arah ini (Kadir & Pamungkas, 2020). Dengan demikian, upaya penumbuhan keterlibatan masyarakat secara luas maupun berbasis komunitas dalam kepengawasan Pemilu perlu diimbangi dengan pemerataan pendidikan, baik melalui kurikulum pada jalur sekolah maupun pendidikan massa dan perluasan pada jalur di luar sekolah. Sejalan dengan itu, walaupun motivasi berprestasi merupakan hasil sosialisasi dari rentang yang panjang sejak masa anak-anak, namun motivasi berprestasi juga dapat dilatihkan kepada orang dewasa. N-Ach terbentuk melalui sosialisasi sejak masa anak-anak. N-Ach merupakan salah satu motif manusia yang menjadi penyebab terjadinya perkembangan ekonomi dan perubahan sosial (McClelland, 1964).

Dalam hal keterlibatan masyarakat dalam persoalan Pemilu, keberpihakan terhadap Pemilu yang jujur, adli dan jauh dari pelanggaran adalah harapan semua pihak. Sayangnya keberpihakan tersebut seringkali kalah dengan kaidah delegasi wewenang kelembagaan. Banyak dari kita yang percaya tentang tidak diperlukannya peran luas individu dan masyarakat sukarela untuk mencapai target berhasilnya penyelenggaraan kepengawasan Pemilu karena semua urusan telah diurus secara penuh oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

Seakan-akan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemilu menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada gilirannya merupakan representasi umum dan memberikan kemanfaatan secara umum. Menurut pengamatan dan pengalaman, semakin tampak bahwa muncul kasus pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu yang dihadapi, bukan sekadar tentang mentalitas budaya oknum (orang perorang), namun juga karena adanya permasalahan structural (Solihah et al., 2018).

Berdasar pada tipologi David Easton (1990), terdapat dua konsep tentang struktur, yaitu (1) sebagai kendala (*as constraints*) dan (2) sebagai pelancar (*as facilitative*) dari perilaku anggota (*participants*) sistem sosial. Sebagai kendala, struktur bersifat membatasi ragam pilihan perilaku bagi anggota sistem sosial. Sebagai pelancar, struktur turut memberipeluang dan memudahkan munculnya perilaku anggota sistem sosial secara tertentu.

Struktur sosial politik, cenderung berhasrat otoritatif. Di satu pihak, struktur ini mampu melancarkan praktik partisipatif terhadap kepengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilu (IDEA (Intstitute for Democracy and Electoral Asistance), 2000; Mujani et al., 2011; Wartoyo & Tungga, 2019). Namun, di lain pihak, struktur demikian ini justru menjadi kendala perilaku kesukarelaan (*voluntarisme*) masyarakat. Akses masyarakat dan komunitas untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, bahkan yang berhubungan dengan kasus dan fakta yang gambalng sekalipun, sangat kecil. Muncul pameo bahwa komunitas masyarakat yang terlibat bukan tumbuh secara alamiah, namun merupakan komunitas bentukan dari partisan yang ditolerasi keberadaannya oleh lembaga penyelenggara atau kepengawasan Pemilu (Affairs, 2004; Fuad, 2014).

Apabila demikian, maka pameo tersebut akan jadi kenyataan, bahwa salah satu penghambat utama terselenggaranya Pemilu dan Kepengawasan Pemilu adalah aparat

penyelenggaranya sendiri. Pelibatan aktif masyarakat menuntut perubahan sikap birokrasi dan lembaga penyertanya. Pandangan penyelenggara kepengawasan Pemilu harus dilandasi pemikiran bahwa masyarakat dapat memperbaiki berlangsungnya proses penyelenggaraan Kepengawasan Pemilu. Catatannya, asalkan diberi kepercayaan dan kesempatan (Agustina & Sutarih, 2019; Nurrahman & Maulana, 2020; Setia Putra et al., 2020).

Adagium “*Yang besar dapat besar, yang kecil dapat kecil*” adalah kecenderungan yang patut dihindari, bahkan dengan dalih pembagian wewenang. Urusan-urusan besar, dipercayakan kepada yang Bawaslu “yang besar”, dan urusan-urusan kecil dipercayakan kepada komunitas masyarakat/sukarelawan “yang kecil”. Praktik ini semata-mata adalah wajah mendua. Jalan keluar yang perlu dan harus adalah memperbaiki struktur sosial politik Kepemiluan yang menghambat menjadi struktur yang memperlancar arus keterbukaan partisipasi masyarakat dalam turut serta mengawasi Pemilu (Januwarso et al., 2021; Prasetyo et al., 2020; Sulistyono, 2002). Memang, perlu adanya kemauan keras dari komunitas dan/atau masyarakat yang tercerahkan untuk bangun, disambut *good will* dari penyelenggara Pemilu dan Kepengawasan Pemilu untuk melibatkan masyarakat yang memiliki semangat kesukarelaan atau *n-Ach* yang tinggi.

CONCLUSION

Penumbuhan keterlibatan masyarakat dalam kepengawasan Pemilu perlu diimbangi dengan pemerataan pendidikan, baik melalui kurikulum pada jalur sekolah maupun pendidikan massa dan perluasan pada jalur di luar sekolah. Sejalan dengan itu, walaupun motivasi berprestasi merupakan hasil sosialisasi dari rentang yang panjang sejak masa anak-anak, namun motivasi berprestasi juga dapat dilatihkan kepada orang dewasa. Motivasi berprestasi terbentuk melalui sosialisasi sejak masa anak-anak dan merupakan salah satu motif manusia yang menjadi penyebab terjadinya perkembangan ekonomi dan perubahan sosial.

REFERENCES

- Affairs, I. (2004). *Advancing Democracy in Indonesia: the Second Democratic Legislative Elections*. June.
- Agustina, H., & Sutarih, A. (2019). Community Participation in Political Democracy. *International Conference on Agriculture, Social Sciences, Education, Technology and Health (ICASSETH 2019)*.
- Anderson, K. (1993). On Hegel and the Rise of Social Theory: A Critical Appreciation of Herbert Marcuse's Reason and Revolution, Fifty Years Later. *Sociological Theory*, 11(3), 243–267. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/201970>
- Baeyer, E. Von. (2010). The Development and History of Horticulture. In *World Environmental History-The Developmental and History of Horticulture* (p. 25). Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS).

- Comim, F. (2002). The Scottish Tradition in economics and the role of common sense in Adam Smith's thought. *Review of Political Economy*, 14(1), 91–114. <https://doi.org/10.1080/09538250120102787>
- Fuad, A. B. B. (2014). Political Identity and Election in Indonesian Democracy: A Case Study in Karang Pandan Village – Malang, Indonesia. *Procedia Environmental Sciences*, 20, 477–485. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.060>
- Hagen, E. E. (1962). *On The Theory of Social Change: How Economic Growth Begins (The Dorsey Series in Anthropology and Sociology)*. Dorsey Press.
- Hartle, A. (2013). *Montaigne and the Origins of Modern Philosophy*. Northwestern University Press.
- Hayati, N. (2020). Optimization of Community Empowerment Through Improving the Potential of the Community in The New Normal Era Proceeding of The Non-Formal Education International Conference 2020 Optimization of Community Empowe. *Digital Press Social Sciences Humanities Proceeding*, 6(9).
- IDEA (Intstitute for Democracy and Electoral Asisstance). (2000). Democratization in Indonesia: An Assessment. *International IDEA*.
- Januwarso, A., Sukristiyanto, A., & Darmawan, A. (2021). Community Political Participation at the Election of Regional Head in Indonesia. *Humanities and Social Sciences*, 9(6), 229. <https://doi.org/10.11648/j.hss.20210906.13>
- Kadir, H. A., & Pamungkas, A. H. (2020). Anthropology as an Educational Practice and Its Current Challenges. *KOLOKIUUM Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 8(2), 114–124. <https://doi.org/10.24036/kolokium-pls.v8i2.424>
- Kawano, T. (2015). Horticulture, Hunting, and Fishing for Survival or Leisure: View Point in 1715 by Louis Liger, a French Non-Academic Agriculturist. In *Horticulture, Hunting, and Fishing for Survival or Leisure* (Issue March).
- Lerner, D. (1958). *The Passing of Traditional Society: Mordernizing the Midle East*. The Free Press.
- McClelland, D. C. (1964). *The Achieving Society*. The Macmillan Publishing.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2011). Voting Behavior in Indonesia since Democratization. In *Cambridge University Press* (pp. 1–7).
- Mulyanto, D. (2008). Konsep Proletarisasi dan Akumulasi Primitif dalam Teori Kependudukan Marxis. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(2), 81.
- Nurrahman, A., & Maulana, A. A. (2020). ... Participation in The 2018 Election in The Maiwa District, Enrekang District (Case Study of the Empty Box Phenomenon in the Elrekang Regent Election for 2018-2023 *Jurnal Konstituen, April 2020*, 158–173. <http://eprints.ipdn.ac.id/6284/>
- Peters, M. A. (2019). The enlightenment and its critics1. *Educational Philosophy and Theory*, 51(9), 886–894. <https://doi.org/10.1080/00131857.2018.1537832>

- Poštić, S. (2004). *Michel de montaigne and the power of language* (Vol. 01513, Issue 8 5, pp. 156–165).
- Prasetio, Karjoko, L., Wardhani, L. T. A. L., Marwiyah, S., Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I., Jaelani, A. K., Tahir, A., & Al-Fatih, S. (2020). Problems of democratic and dignified election in indonesian simultaneously electoral era. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1701–1708. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.193>
- Sætra, H. (2014). The State of No Nature - Thomas Hobbes and the Natural World. *Journal of International Scientific Publication: Ecology and Safety*, 8(June), 177–193